

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Menggerakkan Ekonomi Indonesia



Putri Cantika^{1,*}, Novita Azzahrah²

^{1, 2} Program Studi Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding author email: putricantika@gmail.com

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2026, UMKM menghadapi berbagai peluang dan tantangan di tengah perkembangan digitalisasi dan dinamika ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UMKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia serta mengidentifikasi strategi penguatan sektor UMKM. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, dan persaingan global. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperkuat daya saing UMKM.

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2026-04-09

Revised 2026-06-11

Accepted 2026-06-15

Published 2026-06-26

Keywords

UMKM,
Lapangan Kerja,
Digitalisasi,
Pertumbuhan
Ekonomi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Peran strategis UMKM terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, UMKM menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu menjangkau lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil (Tambunan, 2019). Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi produktif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan karakteristik usaha yang relatif fleksibel dan berbasis sumber daya lokal, UMKM mampu menciptakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat (Kuncoro, 2018). Hal ini menjadikan UMKM sebagai sektor yang inklusif dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam beberapa dekade terakhir, UMKM telah menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Pada saat krisis ekonomi global maupun pandemi COVID-19, UMKM tetap mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar yang cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global (OECD, 2023). Ketahanan ini menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi. Memasuki tahun 2026, peran UMKM semakin penting di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Dalam situasi ini, UMKM dituntut untuk beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar domestik maupun internasional (World Bank, 2024).

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Melalui platform e-commerce dan media sosial, pelaku UMKM dapat memasarkan produknya secara lebih luas tanpa batasan geografis. Transformasi digital ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital (Yusuf, 2022). Namun demikian, proses digitalisasi UMKM tidak berjalan tanpa hambatan. Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi digital, seperti keterbatasan literasi digital, akses internet yang belum

merata, serta kurangnya pemahaman terhadap strategi pemasaran online (Dewi, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang perlu segera diatasi.

Selain tantangan digitalisasi, UMKM juga menghadapi keterbatasan dalam akses pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan dan rendahnya literasi keuangan. Hal ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi (Rahman, 2022). Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia (SDM) pada sektor UMKM masih perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan manajerial menjadi faktor yang mempengaruhi produktivitas dan inovasi UMKM. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan UMKM (Hidayat, 2022).

Persaingan global juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan oleh UMKM. Produk-produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi seringkali menjadi ancaman bagi keberlangsungan UMKM lokal. Untuk menghadapi persaingan ini, UMKM perlu meningkatkan kualitas produk serta melakukan inovasi secara berkelanjutan (Porter, 2018). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, UMKM memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat, UMKM dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai program untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Selain peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan UMKM. Kolaborasi antara berbagai pihak dapat menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Sinergi ini menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar global (Nugroho, 2023). Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, UMKM mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini menjadikan UMKM sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis daerah (Arsyad, 2019). Lebih lanjut, UMKM juga berkontribusi dalam mendorong inklusi ekonomi. Melalui pemberdayaan kelompok masyarakat marginal, seperti perempuan dan pelaku usaha kecil di pedesaan, UMKM mampu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Peran ini sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan (Sari, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2026. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UMKM dalam perekonomian nasional serta mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan aset dan omzet usaha. Definisi ini menegaskan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai bagian dari struktur ekonomi nasional yang mencerminkan aktivitas ekonomi rakyat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Secara umum, UMKM memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari usaha besar. Karakteristik tersebut meliputi keterbatasan modal, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, serta sistem manajemen yang masih tradisional dan seringkali belum terstruktur dengan baik. Selain itu, UMKM cenderung bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha (Tambunan, 2019).

Dari perspektif ekonomi, UMKM dipandang sebagai sektor yang padat karya (labor intensive), sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini menjadikan UMKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan skala usaha yang relatif kecil, UMKM mampu menciptakan peluang kerja dengan investasi yang lebih rendah dibandingkan usaha besar

(Kuncoro, 2018). Selain itu, UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan pasar. Fleksibilitas dalam operasional usaha memungkinkan pelaku UMKM untuk menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemampuan ini menjadi keunggulan kompetitif yang penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah (OECD, 2023).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, UMKM berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga tersebar di daerah pedesaan. Hal ini memungkinkan UMKM untuk berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Arsyad, 2019). Lebih lanjut, UMKM juga memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan. Pelaku UMKM seringkali menciptakan produk-produk baru yang berbasis kearifan lokal dan kebutuhan pasar. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memperkaya keragaman ekonomi nasional (Schumpeter, 1934).

Namun demikian, UMKM juga menghadapi berbagai keterbatasan yang dapat menghambat perkembangannya. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya pemanfaatan teknologi menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM (World Bank, 2024).

Secara keseluruhan, konsep UMKM tidak hanya mencerminkan skala usaha, tetapi juga menggambarkan peran strategisnya dalam perekonomian. Dengan karakteristik yang dimilikinya, UMKM menjadi sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia (Sari, 2023).

Peran UMKM dalam Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan berbagai laporan, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap total PDB nasional, yang menunjukkan bahwa sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Kontribusi tersebut mencerminkan peran penting UMKM dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif di berbagai sektor (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Selain kontribusinya terhadap PDB, UMKM juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Hal ini menjadikan UMKM sebagai solusi strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2025).

UMKM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan ekspor non-migas Indonesia. Produk-produk UMKM seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan produk kreatif lainnya memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan akses pasar global, UMKM dapat meningkatkan kontribusinya terhadap devisa negara (World Bank, 2024). Dalam konteks ekonomi daerah, UMKM berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan, sehingga mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang merata. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Arsyad, 2019). Lebih lanjut, UMKM memanfaatkan sumber daya lokal dalam proses produksinya, baik berupa bahan baku, tenaga kerja, maupun kearifan lokal. Pemanfaatan sumber daya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, UMKM berperan dalam memperkuat ekonomi berbasis lokal (Nugroho, 2023).

UMKM juga berkontribusi dalam mendorong inovasi dan kreativitas dalam perekonomian. Pelaku UMKM seringkali menghadirkan produk-produk unik yang memiliki nilai diferensiasi tinggi di pasar. Inovasi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional (Schumpeter, 1934). Selain itu, UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang

inklusif. Melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan pelaku usaha di daerah terpencil, UMKM mampu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemerataan kesejahteraan (OECD, 2023).

Secara keseluruhan, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangatlah luas dan multidimensional. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan (Sari, 2023).

Tantangan UMKM di Era Digital

Di era digital, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Digitalisasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing UMKM di tingkat global. Transformasi digital memungkinkan UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas melalui platform e-commerce dan media sosial (Yusuf, 2022). Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perilaku konsumen yang kini cenderung beralih ke transaksi online. Kondisi ini mendorong UMKM untuk mengadopsi strategi pemasaran digital agar tetap relevan di pasar. Penggunaan teknologi seperti marketplace, digital payment, dan social media marketing menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menjalankan usaha (OECD, 2023).

Namun demikian, tidak semua UMKM mampu dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami cara memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung kegiatan bisnis mereka (Dewi, 2024). Selain itu, keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan yang signifikan. Di beberapa daerah, terutama wilayah pedesaan, akses internet masih terbatas dan belum merata. Hal ini menghambat proses digitalisasi UMKM dan memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha di daerah perkotaan dan pedesaan (World Bank, 2024).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam hal sumber daya manusia (SDM). Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis berbasis digital, seperti pengelolaan toko online, analisis data pelanggan, dan strategi pemasaran digital. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pemanfaatan teknologi dalam usaha mereka (Hidayat, 2022). Di samping itu, masalah keamanan digital juga menjadi perhatian bagi pelaku UMKM. Risiko seperti penipuan online, kebocoran data, dan serangan siber dapat menghambat kepercayaan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai keamanan digital dalam menjalankan bisnis (Rahman, 2022).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah dan sektor swasta. Program pelatihan digital, pendampingan usaha, serta penyediaan infrastruktur teknologi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas digital UMKM. Selain itu, kolaborasi dengan platform digital juga dapat membantu UMKM dalam mempercepat proses transformasi digital (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Secara keseluruhan, digitalisasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM di Indonesia. Dengan kemampuan adaptasi yang baik serta dukungan kebijakan yang tepat, UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Oleh karena itu, transformasi digital UMKM harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi di era modern (Sari, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian Indonesia tahun 2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan ekonomi melalui interpretasi data yang bersifat deskriptif. Metode studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti

jurnal akademik, buku, laporan resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga internasional yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari sumber terpercaya, seperti laporan Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, serta publikasi dari World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development. Data yang dikumpulkan meliputi informasi terkait kontribusi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, tingkat digitalisasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi UMKM di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi peran strategis UMKM serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam mendukung pengembangan UMKM di era digital (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi UMKM terhadap PDB

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan resmi, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap total PDB nasional. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang dominan dalam struktur perekonomian Indonesia dan menjadi tulang punggung dalam menciptakan nilai tambah ekonomi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Kontribusi UMKM terhadap PDB tidak terlepas dari jumlah unit usaha yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai puluhan juta unit, UMKM mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang masif di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, hingga jasa. Hal ini menjadikan UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pada tahun 2026, kontribusi UMKM terhadap PDB diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi dan pertumbuhan ekonomi digital. Transformasi digital yang mulai diadopsi oleh pelaku UMKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, sehingga mampu meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan (World Bank, 2024). Selain itu, peran UMKM dalam menciptakan nilai tambah ekonomi juga terlihat dari kemampuannya dalam mengolah sumber daya lokal menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap PDB melalui peningkatan output sektor riil. Dengan demikian, UMKM berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi domestik (Arsyad, 2019).

Kontribusi UMKM terhadap PDB juga didukung oleh sektor informal yang cukup besar di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang beroperasi dalam sektor informal namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang luas, baik dalam sektor formal maupun informal (Tambunan, 2019). Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM turut berperan dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDB. Program seperti akses pembiayaan, pelatihan usaha, serta digitalisasi UMKM menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Dukungan ini membantu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing UMKM (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap PDB masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Banyak UMKM yang masih menggunakan metode produksi tradisional sehingga output yang dihasilkan belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

adopsi teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB (OECD, 2023).

Secara keseluruhan, UMKM merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Dengan jumlah pelaku usaha yang besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, serta potensi pengembangan yang luas, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan (Sari, 2023).

Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sektor ini dikenal sebagai sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan dengan usaha skala besar. Berdasarkan data, UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional, sehingga menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja tidak terlepas dari karakteristik usahanya yang fleksibel dan tidak memerlukan persyaratan pendidikan yang tinggi. Hal ini memungkinkan masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui sektor UMKM. Dengan demikian, UMKM berperan penting dalam meningkatkan inklusi tenaga kerja di Indonesia (Kuncoro, 2018). Selain itu, UMKM juga memberikan peluang kerja bagi kelompok masyarakat yang sulit mengakses pekerjaan formal, seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat di daerah pedesaan. Fleksibilitas waktu kerja dan skala usaha yang kecil memungkinkan UMKM menjadi alternatif utama dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan merata (Sari, 2023).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, penyerapan tenaga kerja oleh UMKM berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap, pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi (Arsyad, 2019). Lebih lanjut, UMKM juga berperan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengalaman kerja dan pelatihan informal. Meskipun sebagian besar UMKM belum memiliki sistem pelatihan yang terstruktur, proses pembelajaran langsung di tempat kerja (*learning by doing*) mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja secara bertahap (Hidayat, 2022).

Namun demikian, penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dan teknologi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat upah dan kesejahteraan pekerja di sektor UMKM (World Bank, 2024). Selain itu, sebagian besar tenaga kerja di sektor UMKM masih berada dalam sektor informal yang belum memiliki perlindungan sosial yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kerentanan bagi pekerja, terutama dalam menghadapi risiko ekonomi seperti penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung formalitas usaha dan perlindungan tenaga kerja (OECD, 2023).

Secara keseluruhan, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dengan kemampuannya menciptakan lapangan kerja secara luas dan inklusif, UMKM berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi langkah strategis dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing usaha di era ekonomi modern. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga nasional dan internasional. Dengan adanya platform digital seperti marketplace dan media sosial, UMKM dapat memasarkan produknya secara lebih efektif dan efisien (Yusuf, 2022).

Selain memperluas pasar, digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Penggunaan teknologi dalam proses produksi, manajemen keuangan, serta pengelolaan inventaris memungkinkan pelaku usaha untuk menghemat waktu dan biaya. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif (OECD, 2023). Digitalisasi juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Melalui penggunaan aplikasi digital, UMKM dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan transparan. Misalnya, sistem pembayaran digital dan layanan pelanggan berbasis online memungkinkan interaksi yang lebih baik antara pelaku usaha dan konsumen (Dewi, 2024).

Namun demikian, tingkat adopsi digital di kalangan UMKM masih belum merata. Banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal karena keterbatasan literasi digital. Kurangnya pemahaman mengenai penggunaan teknologi menjadi salah satu hambatan utama dalam proses transformasi digital UMKM (Hidayat, 2022). Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi kendala dalam digitalisasi UMKM, terutama di daerah terpencil. Akses internet yang belum merata dan keterbatasan perangkat teknologi menjadi faktor yang menghambat pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital secara maksimal (World Bank, 2024).

Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong digitalisasi UMKM. Program pelatihan digital, penyediaan infrastruktur teknologi, serta kebijakan yang mendukung transformasi digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan platform digital juga dapat mempercepat proses digitalisasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Secara keseluruhan, digitalisasi UMKM merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan dukungan yang tepat dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, UMKM dapat bertransformasi menjadi sektor yang lebih modern, inovatif, dan mampu bersaing di pasar global (Sari, 2023).

Tantangan dan Hambatan UMKM

Meskipun memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal karena kurangnya agunan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pencatatan keuangan yang memadai (Rahman, 2022).

Keterbatasan akses pembiayaan ini berdampak langsung pada kemampuan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Tanpa dukungan modal yang cukup, pelaku usaha sulit untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, maupun melakukan inovasi produk. Hal ini menyebabkan pertumbuhan UMKM menjadi relatif lambat dibandingkan dengan sektor usaha besar (World Bank, 2024). Selain masalah pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan signifikan bagi UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki keterampilan manajerial, pemasaran, dan teknis yang memadai. Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan usaha menyebabkan efisiensi dan produktivitas UMKM masih tergolong rendah (Hidayat, 2022).

Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat inovasi produk di kalangan UMKM. Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan produk yang bersifat konvensional dan kurang memiliki diferensiasi di pasar. Kurangnya inovasi ini menyebabkan produk UMKM sulit bersaing, terutama dalam menghadapi perubahan selera konsumen yang semakin dinamis (Schumpeter, 1934).

Persaingan dengan produk impor juga menjadi hambatan serius bagi UMKM. Produk impor yang seringkali memiliki harga lebih murah dan kualitas yang lebih konsisten membuat produk lokal sulit bersaing di pasar domestik. Kondisi ini menuntut UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi agar tetap kompetitif (OECD, 2023).

Di era globalisasi dan digitalisasi, UMKM juga menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi. Banyak pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal, baik dalam pemasaran maupun operasional usaha. Keterbatasan ini menyebabkan UMKM tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin berbasis teknologi (Dewi, 2024).

Selain itu, aspek regulasi dan birokrasi juga menjadi hambatan bagi pengembangan UMKM. Proses perizinan yang masih dianggap rumit serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi usaha seringkali menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya secara formal. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat formalitas usaha di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM bersifat multidimensional, mencakup aspek keuangan, sumber daya manusia, inovasi, teknologi, serta regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat berkembang secara optimal dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Sari, 2023).

Strategi Penguatan UMKM

Untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga mencakup aspek pembiayaan, sumber daya manusia, teknologi, inovasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Strategi ini menjadi penting mengingat UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Salah satu strategi utama dalam penguatan UMKM adalah peningkatan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal. Pemerintah perlu memperluas program kredit usaha rakyat (KUR) serta mendorong inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Selain itu, inovasi dalam pembiayaan seperti fintech dan peer-to-peer lending dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional (Rahman, 2022).

Selain pembiayaan, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas usaha. Program pelatihan yang berfokus pada manajemen usaha, pemasaran, serta literasi keuangan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola usahanya secara lebih profesional. Pendampingan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan implementasi pengetahuan yang diperoleh (Hidayat, 2022). Penguatan digitalisasi dan pemasaran online menjadi strategi yang sangat relevan di era ekonomi digital. Pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong adopsi teknologi digital melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur, serta kemitraan dengan platform e-commerce. Dengan digitalisasi, UMKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global (Yusuf, 2022).

Pengembangan inovasi produk juga merupakan strategi penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Pelaku usaha perlu didorong untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah dan diferensiasi di pasar. Inovasi dapat dilakukan melalui pengembangan desain, kualitas produk, maupun pemanfaatan teknologi dalam proses produksi (Schumpeter, 1934). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas dalam penguatan UMKM. SDM yang kompeten akan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM (OECD, 2023).

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengembangan UMKM. Sinergi ini dapat menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, termasuk dalam hal akses pasar, pembiayaan, serta pengembangan teknologi. Kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar juga dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM (Nugroho, 2023). Di samping itu, dukungan kebijakan yang pro-UMKM sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, serta insentif bagi pelaku UMKM dapat mendorong pertumbuhan sektor ini. Kebijakan yang tepat akan memberikan kepastian usaha dan meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM (World Bank, 2024).

Secara keseluruhan, strategi penguatan UMKM harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari berbagai pihak serta kebijakan yang tepat, UMKM dapat berkembang menjadi sektor yang lebih kuat dan kompetitif. Hal ini akan berdampak positif

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sari, 2023).

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian Indonesia pada tahun 2026. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan inklusi ekonomi, serta menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya inovasi produk, serta hambatan dalam adopsi teknologi digital. Persaingan dengan produk impor dan dinamika pasar global juga menjadi tantangan tambahan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut agar UMKM dapat berkembang secara optimal. Melalui penerapan strategi penguatan yang tepat, seperti peningkatan akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, digitalisasi usaha, inovasi produk, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya. Dengan dukungan kebijakan yang kondusif dan sinergi antar pemangku kepentingan, UMKM dapat terus berkembang sebagai sektor yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N. (2013). Bank syariah dan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia: Suatu kajian literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2(1), 48–54.
- Amalina, A. K., & Subiyantoro, S. (2024). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) dalam perekonomian nasional. *Forum Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 338–348.
- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, A., & Panggabean, N. A. (2025). Peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 5376–5385.
- Arsyad, L. (2019). *Ekonomi pembangunan* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.
- Asian Development Bank. (2023). *Asia SME finance monitor 2023*. Asian Development Bank.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Baihaqi, B. (2023). Perkembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) serta pengaruhnya terhadap krisis ekonomi. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 88–100.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Beatrice, C., & Hertati, D. (2023). Model pentahelix dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Manggarsari. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 107–123.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Herispon, H., & Hendrayani, H. (2021). Kontribusi dan eksistensi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Daya Saing*, 7(1), 44–56.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kebijakan fiskal untuk penguatan UMKM*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Laporan tahunan UMKM 2025*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan* (Edisi ke-6). Erlangga.

- Kustanto, A. (2022). Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam dimensi politik hukum integratif. *Qistie*, 15(1), 17–31.
- Luange, J., & Tiakoly, K. (2025). Peran UMKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. *IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(2).
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Nafisa, S. K., Albaris, M. S., Agustina, D. R., Junianda, M., Izzania, T., & Nada, N. S. (2024). Peran usaha-usaha kecil di Palembang terhadap perekonomian nasional. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 118–132.
- Nasrida, M. F., Pandahang, A., & Febrian, D. (2023). Perkembangan UMKM di Indonesia dan potensi di Kota Palangka Raya. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 2(1), 45–49.
- Nugroho, B. (2023). Peran UMKM dalam pengembangan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(2), 88–102.
- Nuvitasari, A., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341–347.
- Pasaribu, S. E., Lubis, D., Nasution, Y. F., Nasution, D. F., Ramadhani, F. N., Ramadan, M. S., ... & Aprilyanisah, F. (2024). Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4385–4393.
- Porter, M. E. (2018). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Purba, D. T., Ningrum, W., Dalimunte, A., Ginting, M. M., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *International Journal of Sharia Business Management*, 4(4), 226–238.
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 282–292.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi teori pengantar* (Edisi ke-3). RajaGrafindo Persada.
- Suryani, S. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1–10.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93*.
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). Peranan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 265–282.
- Widiati, A. (2019). Peranan kemasan (packaging) dalam meningkatkan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di “Mas Pack” Terminal Kemasan Pontianak. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 8(2), 67–76.
- World Bank. (2024). *Small business and economic growth report*. World Bank.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170–186.